

**KAPABILITAS PERTAHANAN INDONESIA MENGHADAPI  
TANTANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(KEMISKINAN, PENDIDIKAN, DAN PENGANGGURAN)**

**Risma Suryani Purwanto<sup>1</sup>, Agung Priambodo<sup>2</sup>, Ifad Fadlurrahman<sup>3</sup>,  
Nrangwesthi Widyaningrum<sup>4</sup>, M. Sarip Kodar<sup>5</sup>**

**1)2)3)4)5) Universitas Pertahanan**  
rismasuryan@gmail.com

Received: 7 February 2020 | Reviewed: 10 February 2020 | Accepted: 19 February 2020

**ABSTRAK**

*Strategi Pertahanan Semesta merupakan sistem pertahanan yang diterapkan di Indonesia. Adanya informasi Indeks Pengembangan Manusia diperoleh gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat dengan pengukuran dari aspek terkait, yaitu: 1) Harapan hidup saat lahir; 2) Harapan Lama Sekolah; 3) Rerata Partisipasi Sekolah; dan 4) Pendapatan Nasional Bruto. Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan yang terbagi dari beberapa dimensi, antara lain kerendahan dari kesehatan serta pendidikan, akses dari masyarakat miskin terhadap tersedianya air bersih juga sanitasi, keamanan fisik rendah dan tidak memadai, kekurangan suara juga kapasitas yang memadai, dan kesempatan untuk dapat kehidupan yang lebih baik. Pendidikan adalah suatu cara untuk meningkatkan pengetahuan penduduk, karena dalam pembangunan saat ini diperlukan partisipasi dari penduduk yang terdidik dan terampil agar dapat berpartisipasi penuh dalam sebuah pembangunan. Pengangguran merupakan sebuah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan akan tetapi belum juga dapat memperolehnya. Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi pertahanan semesta dalam menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah strategi pertahanan semesta harus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*

**Kata Kunci:** *Kesejahteraan Masyarakat, Kemiskinan, Pendidikan, Pengangguran, Sistem Pertahanan Semesta*

Korespondensi:  
Universitas Pertahanan  
Kawasan IPSC Sentul, Sukahati  
Bogor, Jawa Barat  
E-mail: rismasuryan@gmail.com

## ABSTRACT

*Total Defense Strategy is the defense strategy that applied in Indonesia. With the information's of Human Development Index, obtained the representation of citizens welfare that be counted by some aspects, those are: 1) Birth life expectancy; 2) Schooling expected years; 3) Schooling mean years; 4) Gross national income. Poverty defined as a deficiency of welfare by many dimensions, which are the healthy and education's low, poor citizens way to the clean water also the sanitation, the low of physical security, the deficiency of voice and capacity, also the chance to live a better life. Education is a way to increase the citizens's knowledge, because on a development nowadays needed educated and skilled citizens's participation to fully contributing in a development. Unemployment is a condition where somebody want to doing something, but they haven't a job. The purpose is to analyze the total defense strategy to reach citizens welfare. Method that used in this reasearch is literature study. The conclusion is total defense strategy has to be increase to reach citizens welfare*

**Keywords:** Public Welfare, Poverty, Education, Unemployment, Total Defense Strategy

## PENDAHULUAN

Sishanta atau Sistem Pertahanan Semesta merupakan sistem pertahanan Indonesia hingga saat ini. Sishanta diartikan sebagai sistem dalam sektor pertahanan dimana di dalamnya melibatkan seluruh rakyat yang tergabung di dalam komponen-komponen yang ada (Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004). Terdapat tiga komponen dalam sishanta di Indonesia, yakni komponen utama adalah TNI (Tentara Nasional Indonesia); kemudian komponen pendukung yang di dalamnya adalah seluruh sumber daya berskala nasional di Indonesia (Sumber Daya Alam, Manusia, dan Buatan); yang ketiga adalah komponen cadangan yang di dalamnya adalah POLRI (Polisi Republik Indonesia) serta masyarakat yang terlatih. Konsep sistem pertahanan semesta ini telah lama tercipta, bahkan sejak saat Belanda masih menjajah Indonesia, Pemerintah Belanda berencana menerapkan sistem pertahanan semesta itu untuk Indonesia. Hingga saat ini, sistem pertahanan tersebut tetap diadopsi oleh Indonesia. Dengan diterapkannya sistem pertahanan semesta tersebut di Indonesia, maka peningkatan kapasitas rakyat Indonesia juga harus dilakukan dengan sebaik mungkin guna mendukung hal tersebut (Suryohadiprojo, 2013).

Selain untuk mendukung sistem pertahanan semesta, peningkatan kapasitas masyarakat Indonesia juga harus dilakukan agar terjadi peningkatan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Peningkatan taraf hidup ini juga mempengaruhi terhadap meningkatnya penghidupan

masyarakat Indonesia. Ketika penghidupan masyarakat Indonesia meningkat maka hal tersebut juga dapat menjadi langkah baik agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesejahteraan masyarakat ini adalah ukuran dari tingkat kehidupan dan penghidupan dari masyarakat Indonesia sendiri. Tingkat kehidupan yang dilihat adalah bagaimana kesenjangan sosial yang masih terjadi dimasyarakat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kemakmuran dan kekuatan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi dan dari sektor pangan. Namun untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, terdapat tantangan yang harus dilalui oleh Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah kemiskinan, tingkat pendidikan, dan juga pengangguran. Ketiga hal tersebut merupakan masalah besar yang harus diatasi oleh Pemerintah Indonesia apabila ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan nasional yang terdapat di dalam Preambule UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam mensikapi upaya meningkatkan sistem pertahanan semesta dalam kaitannya dengan mengatasi tantangan dari kesejahteraan masyarakat tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi pertahanan negara dalam menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat, yaitu: kemiskinan, pendidikan dan pengangguran.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan mengenai metode pengumpulan literasi pustaka, membaca juga mencatat, serta mengelola setiap bahan penelitian. Dalam teori Danial dan Warsiah, studi literatur merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa buku-buku, lalu majalah yang terkait dengan permasalahan juga tujuan penelitian. Teknik ini dilaksanakan dengan adanya tujuan untuk mengemukakan berbagai teori-teori yang dapat dikatakan relevan dengan rumusan permasalahan yang ketika ini dihadapi/diteliti sebagai sebuah bahan rujukan yang ada dalam pembahasan hasil dari penelitian ini. Definisi yang lain mengenai studi literatur yaitu untuk mencari referensi serta teori yang dikategorikan relevan dengan kasus dan/atau rumusan permasalahan yang telah ditemukan. Selanjutnya, referensi terkait dapat ditemukan dari buku, atau jurnal. Dapat juga dari artikel dari laporan penelitian, juga situs-situs yang ada di internet.

Secara keseluruhan, studi literatur merupakan cara dalam menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri berbagai sumber-sumber tulisan atau referensi yang pernah dimuat sebelumnya. Dengan arti kata lain, istilah studi literatur tersebut juga dapat dikatakan sangat familiar dengan istilah studi pustaka. Dalam suatu penelitian yang akan dijalankan, haruslah

seorang peneliti mempunyai wawasan yang cukup luas terkait objek yang hendak diteliti. Jika tidak mencukupi, maka akan dipastikan dalam presentasi yang lebih besar bahwa penelitian tersebut berkemungkinan gagal. Referensi tersebut berisikan tentang: Sistem Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat secara umum, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran. Output berdasarkan studi literatur tersebut adalah terkoleksinya berbagai referensi yang dikategorikan relevan dengan perumusan masalah. Tujuannya yaitu untuk menguatkan permasalahan yang dalam penelitian ini bagaimana sistem pertahanan semesta yang diaplikasikan di Indonesia dalam menghadapi tantangan kesejahteraan masyarakat, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan, juga pengangguran; juga sebagai dasar dari teori ketika melakukan studi.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Konseptualisasi Sistem Pertahanan Semesta di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun sebelum akhirnya Jepang mendominasi dan Belanda terusir dari Indonesia. Selama masa penjajahannya, pemerintah Belanda berencana untuk menerapkan sistem pertahanan di Indonesia sebagai negara di bawah kependudukannya dengan konsepsi sistem pertahanan yang melibatkan elemen-elemen pertahanan seperti tentara dan lain sebagainya. Setelah masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem pertahanan semesta. Sistem pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat sebagai komponen-komponen pertahanan di dalamnya, TNI sebagai komponen utama; masyarakat sipil sebagai komponen pendukung; dan masyarakat yang terlatih sebagai komponen cadangan. Sistem pertahanan semesta ini telah diterapkan dan dipelihara hingga saat ini.

Kebijakan Regulasi di bidang pertahanan diarahkan pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan Program Legislasi Nasional melalui pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai keamanan nasional, kerahasiaan negara, pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara, revisi atas Undang-Undang tentang Tentara Nasional, serta peraturan perundang-undangan lainnya baik yang didelegasikan oleh Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Veteran, Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan (setkab.go.id). Sistem pertahanan yang diperlukan oleh Indonesia dalam usaha penangkalan

tidak hanya tentang sistem pertahanan militer, tetapi juga sistem pertahanan nonmiliter. Dimana yang dimaksud dengan sistem pertahanan nonmiliter ialah suatu sistem pertahanan yang bukan sekadar menjadi sistem pendukung pertahanan militer sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 UURI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, melainkan suatu sistem tersendiri dalam Sishanrata sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat 3 UURI No. 3 Tahun 2002 itu (Suryokusumo, 2016).

Memasuki era globalisasi yaitu era revolusi industri 4.0, juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan juga teknologi, konsep sistem pertahanan semesta harus terus ditingkatkan. Peningkatan sistem pertahanan semesta dapat dilakukan dengan perbaruan alat utama dalam sistem persenjataan, sebagai perlengkapan penting dari sistem pertahanan. Kemudian dengan meningkatkan kapasitas dari setiap komponen yang ada, dengan adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai bela negara yang tengah digaungkan oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang mengenai PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional). Sikap bela negara merupakan sikap atau perilaku cinta tanah air, dimana masyarakat Indonesia mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Sikap bela negara juga tidak selalu mengenai wajib militer, namun dapat dilakukan sesuai dengan bidang dan profesi dari setiap masyarakat Indonesia. Namun demikian, kesalahan persepsi dari bela negara yang dikaitkan dengan wajib militer membuatnya tidak dapat diterapkan dengan maksimal. Upaya-upaya dalam peningkatan sistem pertahanan negara di atas merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Segala upaya dapat mencapai tujuan apabila mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Karena tujuan dari segala upaya yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## **2. Menelusuri Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia**

*HDI (Human Development Index)* merupakan bentuk ukuran dalam menilai peningkatan jangka panjang dimensi-dimensi pembangunan manusia, yaitu harapan hidup juga kesehatan, lalu akses pengetahuan dan pendidikan, dan kehidupan layak. Informasi angka serta peringkat HDI diperoleh gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari aspek-aspek: 1) *Birth's life expectancy* yaitu harapan hidup ketika lahir yang digunakan sebagai ukuran kualitas dari kesehatan; 2) *Schooling's expected years* yaitu harapan lama sekolah yang digunakan sebagai ukuran pendidikan; 3) *Schooling's mean years* rerata partisipasi sekolah yang digunakan sebagai ukuran pemerataan pendidikan; serta 4) *Gross National's Income*

yaitu pendapatan nasional bruto yang digunakan sebagai ukuran tingkat ekonomi masyarakat (Yuliani, 2016).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia. Namun selain daripada tujuan, kesejahteraan masyarakat juga merupakan tantangan bagi Pemerintah Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena untuk mencapai satu kesejahteraan masyarakat maka harus diupayakan agar segala hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut dapat dientaskan atau diminimalisir. Kesejahteraan masyarakat ini juga merupakan salah satu indikator dalam penilaian kekuatan dan kemakmuran dari suatu negara. Seperti yang telah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru dimana Presiden Soeharto ketika itu dapat mewujudkan swasembada beras. Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur dari keberhasilan sektor pertanian Indonesia.

Memasuki era revolusi 4.0 ini, penerapan ilmu pengetahuan juga teknologi dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian dalam indikasi kemakmuran masyarakat harus ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya bagaimana Indonesia meningkatkan devisa negara dengan menguatkan sektor ekonomi dengan upaya-upaya pengelolaan ekspor-impor yang lebih efisien. Ekspor-impor merupakan salah satu strategi perdagangan yang harus dikelola dengan baik, karena melalui ekspor-impor lah Indonesia dapat mempromosikan kualitas produk dan pasar dagangnya. Seperti saat ini, Indonesia telah mencetuskan slogan untuk mencintai produk dalam negeri dengan berbagai kegiatan dan media. Hal demikian dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk-produk dalam negeri dan juga melestarikan pengusaha-pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sebab UMKM merupakan perpaduan antara kelembagaan, unsur-unsur pendukung seperti penduduk, institusi dan semangat kewirausahaan di dalam analisis pembangunan ekonomi untuk negara seperti Indonesia (Arsyad, 2010).

Pengusaha-pengusaha UMKM tersebut yang dapat melestarikan lapangan kerja bagi banyak masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. UMKM juga merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas tangan-tangan terampil dari masyarakat Indonesia. UMKM berperan penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia dengan perannya sebagai, sarana mengentaskan maraknya kemiskinan di masyarakat Indonesia dengan adanya data milik Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2011 dengan penyerapan lebih kurang 101,7 juta pekerja dengan 55,2 juta unit UMKM dan meningkat dengan penyerapan sekitar 114 juta pekerja dengan 57,8 unit UMKM, sarana untuk pemerataan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia karena UMKM dapat berada dimana saja di seluruh provinsi yang ada di Indonesia hingga ke penjuru negeri, dan juga memberikan tambahan

devisa bagi negara Indonesia dengan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2017 para pelaku UMKM menyumbang devisa negara sebesar Rp 88,45 miliar (Dwi, 2017).

Setiap upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri. Semakin banyak masyarakat di Indonesia yang menjadi wirausaha maka akan akan melahirkan semakin banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lain atau yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Di dalam upaya-upaya tersebut, tentu tidak pernah terlepas dari hambatan atau tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut merupakan tantangan dasar yang selalu ada di setiap negara dari negara miskin hingga negara maju, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Tantangan tersebut antara lain: kemiskinan, tingkat pendidikan, dan pengangguran. Ketiga hal tersebut adalah tantangan yang belum dapat dientaskan oleh Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Kemiskinan**

Yang pertama adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat Indonesia hidup di bawah batas kelayakan dalam hal kehidupan dan penghidupan, atau yang dapat disebut dengan hidup dengan kekurangan. Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya kesejahteraan yang terbagi dari banyak dimensi antara lain terkait rendahnya tingkat kesehatan juga pendidikan, jalan masyarakat yang dikatakan miskin terhadap kebutuhan air bersih juga sanitasi, keamanan dari fisik yang dirasa tidak memadai, kurangnya suara juga kapasitas yang memadai serta dengan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang sangat baik (The World Bank, 2007). Identifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari sektor ekonomi menjadi tiga oleh Sharp, et. Al (dalam Kuncoro, 2010), yaitu:

- a. Secara mikro, kemiskinan ada karena terjadi ketidaksamaan dalam pola kepemilikan dari sumber daya yang mmunculkan distribusi dari pendapatan yang tidakimbang;
- b. Kemiskinan ada akibat adanya perbedaan dalam tingkat kualitas sumber daya dari manusia, kualitas dari SDM yang rendah menunjukkan produktivitasnya yang rendah dan yang membuat upah menjadi kecil.
- c. Kemiskinan ada akibat adanya perbedaan akses di dalam modal.

Kemiskinan merupakan momok yang sangat besar dengan jumlah masyarakat Indonesia yang lebih dari 260 juta jiwa dan tidak tersebar merata ke seluruh pelosok Indonesia. Transmigrasi dan urbanisasi adalah dua kegiatan atau upaya yang telah banyak dilakukan oleh

masyarakat Indonesia. Baik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya pemerataan, atau yang merupakan inisiasi dari masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Urbanisasi banyak dilakukan oleh masyarakat dari pedesaan yang ingin berpindah ke daerah perkotaan yang dinilai menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Namun banyak juga kaum urban yang setelah menetap di daerah perkotaan menjadi semakin miskin atau bahkan menjadi gelandangan dan pengemis yang hidup di jalanan. Hal tersebut dapat terjadi karena para kaum urban tidak memiliki keterampilan atau kecakapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak saat memutuskan untuk melakukan urbanisasi. Yang kemudian membuatnya tidak dapat berbuat banyak untuk bertahan di perkotaan.

### **Pendidikan**

Yang kedua adalah tingkat pendidikan, hampir dapat dikatakan tidak ada yang menyanggah bahwa pendidikan merupakan pionir di dalam pembangunan masa depan. Jika dunia pendidikan tidak diperhatikan secara maksimal, maka kehancuran dari bangsa tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan menyangkut dengan pembangunan karakter juga sekaligus tetap mempertahankan jati diri manusia. Banyak orang yang miskin yang juga mengalami kebodohan dan/atau mengalami kebodohan yang dilihat secara sistematis. Oleh karena itu, penting dalam memahami bahwa kemiskinan juga dapat mengakibatkan kebodohan, kemudian kebodohan jelas terpikir identik dengan kemiskinan (Wijayanto, 2010). Pendidikan juga merupakan sebuah bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kemiskinan karena tingkat pendidikan adalah salah satu dari komponen yang terkait dalam penyebab kemiskinan (Iswara, 2014).

Tingkat pendidikan merupakan modal dasar seseorang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang lebih layak atau untuk membuka usaha baru. Untuk dapat menjadi seorang pengusaha tidak hanya dibutuhkan kebulatan tekad tetapi juga dibutuhkan pengetahuan mengenai kewirausahaan dan strategi yang baik untuk keberlangsungan usahanya. Untuk masa globalisasi ini tingkat pendidikan sangat berpengaruh guna meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan ini tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tetapi juga adalah pendidikan informal. Jika pendidikan formal dikatakan sebagai modal dasar, maka pendidikan informal merupakan pendukung atau penunjang dari modal dasar pendidikan formal tersebut. Baik pendidikan formal maupun informal, keduanya sangat berperan dalam menunjang karir seseorang, karena keduanya adalah modal dalam bidang pendidikan dan keterampilan. Banyak



masyarakat yang tidak memiliki keterampilan apapun dan hanya bermodalkan pendidikan minimal kemudian beradu nasib di kota-kota besar di Indonesia, meski hasilnya akan tersingkir dengan para pesaingnya yang memiliki tingkat pendidikan lebih dan keterampilan lebih baik.

### **Pengangguran**

Yang ketiga adalah pengangguran, pengangguran merupakan kondisi dimana masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang termasuk ke dalam golongan angkatan kerja yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan akan tetapi kemudian belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2000). Pengangguran ini juga dapat berasal dari kalangan yang tidak memiliki modal atau hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki tingkat pendidikan yang baik. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terdiri dari tiga macam: (Salamadian, 2018)

- a. Pengangguran Terselubung adalah tenaga kerja di Indonesia yang tidak dapat bekerja secara maksimal karena adanya alasan-alasan tertentu.
- b. Setengah Menganggur merupakan tenaga kerja di Indonesia yang lebih rendah dari 35 jam bekerja per minggu.
- c. Pengangguran Terbuka merupakan tenaga kerja di Indonesia yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya manusia dalam jumlah besar, namun sumber daya manusianya yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia dalam golongan kompeten.

Pengangguran telah menjamur dimana-mana. Pengangguran ini dapat dikatakan adalah salah satu pemicu dari banyaknya gelandangan dan pengemis di Indonesia. Pengemis dan gelandangan tercipta karena mereka tidak memiliki ruang atau kemampuan untuk bersaing dengan yang lainnya. Terlebih lagi mental masyarakat Indonesia yang lebih suka untuk meminta belas kasih daripada berusaha untuk berbuat sesuatu. Pengangguran juga adalah salah satu indikasi dalam meningkatnya kriminalitas di lingkungan masyarakat Indonesia. Kriminalitas yang tinggi merupakan ancaman tersendiri bagi keamanan nasional Indonesia. Kriminalitas dapat memicu konflik antar masyarakat karena masyarakat merasa diresahkan dengan adanya oknum-oknum kriminal tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari setiap negara di dunia, termasuk juga dengan Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat oleh Pemerintah Indonesia, salah satu arahnya adalah selalu menuju ke kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam kasus ini dapat terlihat dari segi kemakmuran yang merupakan indikator dari keberhasilan suatu negara dengan sistem dan kebijakan pemerintahannya. Dalam usaha untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan yakni kemiskinan, pendidikan dan juga pengangguran. Ketiganya merupakan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia di dalam upayanya untuk mencapai suatu tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketiga tantangan tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika tingkat pendidikan dapat ditingkatkan, maka hal tersebut akan menjadi modal dasar yang baik untuk meminimalisir pengangguran. Sejalan dengan itu, ketika pengangguran menjadi semakin sedikit maka kemiskinan juga akan berkurang. Jika ketiga tantangan tersebut berhasil diatasi maka sistem pertahanan negara juga akan semakin kuat. Karena peningkatan dari sebuah sistem pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat berbanding lurus sehingga keduanya harus bekerja bersama-sama. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah guna mengentaskan ketiga tantangan permasalahan tersebut juga berkaitan dengan sistem bidang pertahanan negara yang memiliki sifat semesta, dimana dalam konsepsi sistem pertahanan semesta ini masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mempertahankan kedaulatan negara, dan oleh karena itu dalam sistem pertahanan negara yang masuk ke dalam sifat semesta ini harus didukung secara penuh oleh masyarakat, dan masyarakat harus ikut berkontribusi dan pelaksanaannya guna menghadapi tantangan dari kesejahteraan rakyat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Dwi, Hikhman R. (2017). *3 Peran Penting UMK. Penggerak Penting Ekonomi Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com> (Diakses pada 11 Desember 2019)
- Kuncoro, Mudrajat. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Iswara, Made I Anom dan I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali Tahun 2006 -2011. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [11]. Bali: Universitas Udayana
- Perpres No. 97/2015: Inilah Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. <https://setkab.go.id/perpres-no-972015-inilah-kebijakan-umum-pertahanan-negara-tahun-2015-2019/> (Diakses pada 11 Desember 2019)
- Salamadian. (2018). *Pengangguran: Pengertian, Penyebab, dan Jenis-Jenis Pengangguran*. <https://salamadian.com/pengertian-jenis-jenis-pengangguran/> (Diakses pada 12 Desember 2019)
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryokusumo, Suryanto. (2016). *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryohadiprojo, Sayidiman. (2013). *Sistem Pertahanan Rakyat Semesta* <https://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1634> (Diakses pada 17 Januari 2020)
- Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004
- Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008*. Semarang: Universitas Diponegoro

The World Bank Office Jakarta. (2007) *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Grha Info Kreasi

<http://documents.worldbank.org/curated/en/897131468038955494/pdf/373490v10revis1100PA0Report0English.pdf> (Diakses pada 24 Februari 2010)

Yuliani. (2016). Pendidikan di Indonesia dalam Human Development Index (HDI). *Jurnal Rantai Keilmuan PPKN* Vol. 2 No 2. Tulungagung: STKIP PGRI Tulungagung